

## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN DINAMIKA DEMOGRAFI TERHADAP LAJU INFLASI, JUMLAH PENDUDUK SERTA TINGKAT PENGANGGURAN: STUDI KOMPARATIF PROVINSI MALUKU UTARA DAN KALIMANTAN TIMUR

Fitrawaty<sup>1</sup>, Jessica Angelina Sitorus<sup>2</sup>, Dian Petrishia Tambunan<sup>3</sup>, Nopra Purba<sup>4</sup>,  
Agni Anggita Br Ginting<sup>5</sup>, Stefani Br Tarigan<sup>6</sup>

[fitrawaty@unimed.ac.id](mailto:fitrawaty@unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [jessikasitorus052@gmail.com](mailto:jessikasitorus052@gmail.com)<sup>2</sup>, [dianptambunan@gmail.com](mailto:dianptambunan@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[purbanopra4@gmail.com](mailto:purbanopra4@gmail.com)<sup>4</sup>, [anggitaginting08@gmail.com](mailto:anggitaginting08@gmail.com)<sup>5</sup>, [stefanitarigan887@gmail.com](mailto:stefanitarigan887@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Peningkatan pengeluaran pemerintah dan ledakan migrasi penduduk di Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Timur menciptakan tantangan baru terhadap stabilitas harga dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaruh pengeluaran pemerintah dan dinamika demografi terhadap laju inflasi serta tingkat pengangguran di kedua provinsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif regresi linier berganda menggunakan data sekunder periode 2021 hingga awal 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur masif di Kalimantan Timur berhasil menyerap tenaga kerja secara signifikan dengan tingkat inflasi yang stabil. Sebaliknya, investasi hilirisasi di Maluku Utara sukses mempertahankan angka pengangguran yang rendah, namun wilayah ini menghadapi lonjakan inflasi yang tinggi akibat kendala pasokan pangan jalur laut. Kesimpulannya, kedua wilayah sukses memanfaatkan pertumbuhan populasi untuk menekan pengangguran, meskipun membutuhkan pendekatan kebijakan ekonomi yang berbeda untuk menjaga stabilitas secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Pengeluaran Pemerintah, Demografi, Inflasi, Pengangguran, Ekonomi Regional.

### ABSTRACT

*Increased government spending and massive population migration in North Maluku and East Kalimantan create new challenges for price stability and employment. This study aims to compare the impact of government spending and demographic dynamics on inflation and unemployment rates in both provinces. The research uses a quantitative multiple linear regression method analyzing secondary data from 2021 to early 2026. The results show that massive infrastructure spending in East Kalimantan successfully absorbed labor with stable inflation. Conversely, downstream industrial investment in North Maluku kept unemployment rates low, but the region faced highly volatile inflation due to maritime food supply constraints. In conclusion, both regions successfully utilized their demographic growth to reduce unemployment, although they require different targeted policy approaches to maintain comprehensive regional economic stability.*

**Keywords:** Economic Government Spending, Demographics, Inflation, Unemployment, Regional Economy

### PENDAHULUAN

Pengendalian tingkat inflasi dan penciptaan kesempatan kerja merupakan sasaran utama stabilitas ekonomi makro, terutama saat Indonesia menghadapi masa transisi berupa lonjakan angkatan kerja produktif. Dalam kerangka kebijakan daerah, pengeluaran pemerintah memegang peranan krusial untuk menstimulasi pergerakan sektor riil; namun, ekspansi fiskal yang tidak diimbangi dengan kapasitas produksi dapat memicu demand-pull inflation. Fenomena paradoks yang sangat menarik saat ini terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dengan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Maluku Utara dengan pusat hilirisasi nikelnya, di mana kucuran dana yang masif dan investasi besar-besaran justru

diikuti oleh anomali kenaikan tingkat pengangguran akibat ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch) angkatan kerja lokal. Di saat yang bersamaan, kedua wilayah ekstraktif ini sama-sama menghadapi tekanan inflasi regional yang tinggi akibat ledakan demografi pekerja pendatang (migrasi) yang memicu tarikan permintaan konsumsi melampaui kapasitas pasokan logistik pangan daerah.

Kajian literatur makroekonomi sebelumnya secara umum sepakat bahwa kebijakan intervensi pemerintah melalui instrumen fiskal ekspansif merupakan metode terbaik untuk mendorong permintaan agregat dan efektif menurunkan pengangguran, meskipun membawa konsekuensi risiko peningkatan inflasi. Sementara itu, kelompok studi di bidang ekonomi demografi menekankan bahwa besarnya jumlah penduduk usia produktif akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan apabila rasio tenaga kerja tersebut didukung oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai. Meskipun pendekatan Keynesian dan teori kependudukan tersebut memberikan landasan yang kuat, literatur terdahulu memiliki batasan utama karena umumnya belum mengkaji anomali spasial yang dipicu oleh guncangan investasi tersentralisasi dan ledakan arus migrasi internal yang ekstrem di luar pulau Jawa. Untuk mengatasi keterbatasan empiris tersebut, penelitian ini berupaya membedah patahan asumsi Kurva Phillips di tingkat daerah berskala kawasan industri dan megaprojek. Manfaat ilmiah dan kebaruan dari artikel ini terletak pada penggunaan analisis komparatif antara dua episentrum ekonomi baru yang memiliki karakteristik kausalitas spesifik—pengeluaran pemerintah berbasis infrastruktur fisik versus dinamika demografi pekerja hilirisasi—untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membandingkan dan menganalisis besaran serta arah pengaruh dari pengeluaran pemerintah dan dinamika demografi terhadap laju inflasi serta tingkat pengangguran antara Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Timur.

## **METODOLOGI**

Jenis dan Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dengan desain studi komparatif. Pendekatan kuantitatif berupa Ekonometrika digunakan untuk mengukur seberapa besar dinamika variabel independen memengaruhi variabel dependen secara presisi. Desain komparatif diterapkan untuk membandingkan anomali fenomena makroekonomi antara dua episentrum ekonomi yang memiliki basis pertumbuhan berbeda, yaitu ekspansi infrastruktur fisik versus dinamika pekerja hilirisasi.

Subjek dan Objek Penelitian Subjek wilayah (spasial) dalam penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Timur (merekpresentasikan pusat megaprojek infrastruktur IKN) dan Provinsi Maluku Utara (merekpresentasikan episentrum hilirisasi nikel). Objek penelitian berfokus pada data runtut waktu (time series) untuk periode tahun 2021 hingga awal tahun 2026. Variabel yang diteliti terdiri dari Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Dinamika Demografi/Jumlah Penduduk (X2) sebagai variabel independen, serta Laju Inflasi (Y1) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2) sebagai variabel dependen.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi sekunder. Instrumen pencatatan difokuskan pada pengumpulan data historis runtut waktu (time series) yang dirilis secara resmi oleh lembaga negara terkait. Sumber data utama ditarik dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk indikator inflasi (IHK), kependudukan, dan pengangguran, serta data pendukung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

Teknik Analisis Data Analisis data utama dilakukan dengan metode Analisis Regresi Linier Berganda melalui pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) yang diolah menggunakan perangkat lunak statistik seperti EViews. Sebelum estimasi model

ditafsirkan, data wajib melalui serangkaian Uji Asumsi Klasik yang mencakup uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Pengujian prasyarat ini diwajibkan untuk memastikan bahwa hasil perhitungan regresi andal, konsisten, tidak bias, dan memenuhi standar Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).

Sebagai tambahan, teknik analisis juga melibatkan perhitungan matematis demografi dan inflasi menggunakan rumus standar BPS, antara lain Laju Pertumbuhan Penduduk Geometrik untuk memproyeksikan populasi dan metode perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) Year-on-Year (y-on-y) serta Month-to-Month (m-to-m) untuk mengukur inflasi komparatif daerah.

Bagan Desain dan Langkah Penelitian Berikut adalah ilustrasi desain dan alur penelitian kuantitatif komparatif yang dijalankan dalam studi ini:

[Mulai] ↓ [Identifikasi Fenomena Makroekonomi] (Patahan Kurva Phillips di wilayah Kalimantan Timur & Maluku Utara) ↓ [Pengumpulan Data Sekunder (Periode 2021–2026)] (Variabel X: Pengeluaran Pemerintah & Dinamika Demografi) (Variabel Y: Laju Inflasi & Tingkat Pengangguran Terbuka) ↓ [Pengujian Asumsi Klasik (Prasyarat)] (Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi untuk mencapai BLUE) ↓ [Analisis Ekonometrika Kuantitatif] (Estimasi Regresi Linier dengan Metode Ordinary Least Squares / OLS) ↓ [Analisis Komparatif Spasial] (Membandingkan nilai koefisien regresi pengeluaran dan demografi antara Kaltim dan Malut) ↓ [Interpretasi Hasil & Rekomendasi Kebijakan] ↓ [Selesai]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan ilmiah utama dari penelitian ini membuktikan bahwa ekspansi pengeluaran pemerintah dan ledakan demografi pekerja secara efektif mampu menekan tingkat pengangguran di wilayah episentrum ekonomi baru, namun memicu guncangan inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) dengan pola volatilitas yang sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur logistik daerah. Hasil ini menjawab tujuan awal penelitian yang ingin membandingkan efektivitas kebijakan makroekonomi antara Provinsi Kalimantan Timur dan Maluku Utara. Di Kalimantan Timur, injeksi fiskal yang masif untuk megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bertindak sebagai mesin penyerap tenaga kerja yang sukses menurunkan angka pengangguran secara tajam, sekaligus menarik arus migrasi produktif berskala besar. Di sisi lain, temuan di Maluku Utara menunjukkan bahwa investasi hilirisasi nikel berhasil menciptakan stabilitas pasar kerja dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah, meskipun wilayah ini tidak mengandalkan pengeluaran pemerintah secara langsung sebagai motor utama.

Interpretasi ilmiah atas temuan ini menunjukkan adanya perbedaan struktural dalam merespons tekanan harga. Meskipun kedua provinsi mengalami ledakan populasi dan aktivitas ekonomi, Kalimantan Timur mampu menjaga laju inflasi relatif stabil karena pengeluaran pemerintah di sana difokuskan pada pembangunan konektivitas darat yang pada akhirnya mengefisienkan rantai pasok logistik. Sebaliknya, inflasi di Maluku Utara sangat volatil dan meroket tajam karena ledakan demografi pekerja tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pangan dan sangat bergantung pada kerentanan pasokan jalur laut. Selain itu, analisis lebih dalam pada struktur tenaga kerja mengungkapkan anomali di mana kelompok lulusan sekolah vokasi (SMK) justru mendominasi angka pengangguran di kedua wilayah. Secara ilmiah, hal ini mengindikasikan terjadinya fenomena ketidaksesuaian keterampilan (*skills mismatch*), di mana kurikulum pendidikan lokal gagal memenuhi kualifikasi teknis tinggi yang dituntut oleh industri modern seperti smelter nikel dan konstruksi *smart city*.

Temuan ini memberikan perspektif baru yang berbeda dari beberapa literatur terdahulu. Pertama, hasil riset ini secara empiris memperkuat pandangan Teori Keynesian (seperti yang dikemukakan oleh Blanchard dan Perotti) bahwa kebijakan fiskal ekspansif sangat efektif mendorong permintaan agregat dan menurunkan pengangguran. Namun, perbedaan paling mencolok dan menjadi nilai jual utama dari penelitian ini terletak pada pembuktian anomali Kurva Phillips. Penelitian-penelitian makroekonomi sebelumnya di tingkat nasional Indonesia sering kali menyimpulkan bahwa inflasi memiliki hubungan positif dengan pengangguran (inflasi tinggi memicu PHK akibat turunnya daya beli). Sebaliknya, studi komparatif spasial ini justru menemukan bahwa pada kawasan dengan guncangan investasi yang ekstrem seperti Kaltim dan Malut, asumsi klasik Kurva Phillips kembali berlaku: tingginya tingkat inflasi berjalan beriringan dengan rendahnya tingkat pengangguran. Tingginya inflasi di kedua wilayah tersebut murni didorong oleh fenomena kelebihan permintaan (*over-demand*) akibat ledakan demografi ekonomi, bukan karena inefisiensi produksi. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan daerah tidak bisa lagi sekadar berfokus pada penciptaan lapangan kerja, melainkan harus merealokasi anggaran untuk manajemen risiko logistik pangan dan penyelarasan pendidikan vokasi agar pertumbuhan tidak berbalik menjadi beban struktural baru

## Diskusi

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa intervensi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) memiliki mekanisme transmisi ekonomi yang berbeda pada karakteristik wilayah yang berbeda. Pertanyaan awal mengenai perbandingan kemiskinan dan pengangguran terjawab melalui fakta bahwa Kalimantan Timur menggunakan strategi **pertumbuhan didorong investasi (IKN)** untuk menekan pengangguran, sementara Maluku Utara mengandalkan **kawasan ekonomi khusus (KEK Morotai)** untuk menciptakan diversifikasi lapangan kerja hingga 30.000 tenaga kerja pada 2025. Temuan utama kami menonjolkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di Kalimantan Timur tidak serta merta menjamin stabilitas harga, yang terlihat dari lonjakan inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan transportasi.

Interpretasi ilmiah atas temuan ini merujuk pada teori *Multiplier Effect*. Di Kalimantan Timur, pembangunan IKN memicu peningkatan permintaan kebutuhan pangan dan jasa secara mendadak (shocks), yang karena keterbatasan pasokan lokal, mendorong kenaikan harga. Di wilayah Maluku, terjadi paradoks ekonomi di mana kekayaan sumber daya laut dan tambang (nikel) belum optimal menyejahterakan masyarakat karena **biaya logistik yang 30-40% lebih mahal** dari Pulau Jawa, sehingga terjadi *economic leakage*. Hal ini menjelaskan mengapa sektor pertambangan di Malut memiliki nilai LQ sangat tinggi (9,56) namun kontribusi Kabupaten Morotai terhadap PDRB provinsi masih relatif kecil.

Hasil penelitian ini memberikan perspektif baru yang melengkapi studi sebelumnya oleh Khairiyakh (2015) dan Samuel (2022). Jika penelitian terdahulu hanya berhenti pada **pemetaan sektor basis** melalui analisis LQ-DLQ, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menghubungkan dinamika sektor tersebut dengan variabel makro riil seperti inflasi dan kesejahteraan petani (NTP). Terdapat perbedaan signifikan dengan hasil penelitian Tutupoho (2019) yang menyatakan sektor basis di Maluku belum berdampak signifikan; temuan kami justru menunjukkan bahwa melalui skema *onshore* pada proyek seperti Blok Masela dan hilirisasi nikel, potensi penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan rumah tangga menjadi jauh lebih terukur melalui hak *Participating Interest* 10% bagi daerah. Kesimpulannya, transformasi ekonomi di kedua wilayah memerlukan sinkronisasi antara pembangunan fisik masif dengan penguatan rantai pasok logistik lokal guna menahan laju inflasi.

harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data secara rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Diskusi harus mengeksplorasi pentingnya hasil penelitian, bukan mengulangnya. Bagian Hasil dan Diskusi gabungan sering kali cocok. Hindari kutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan.

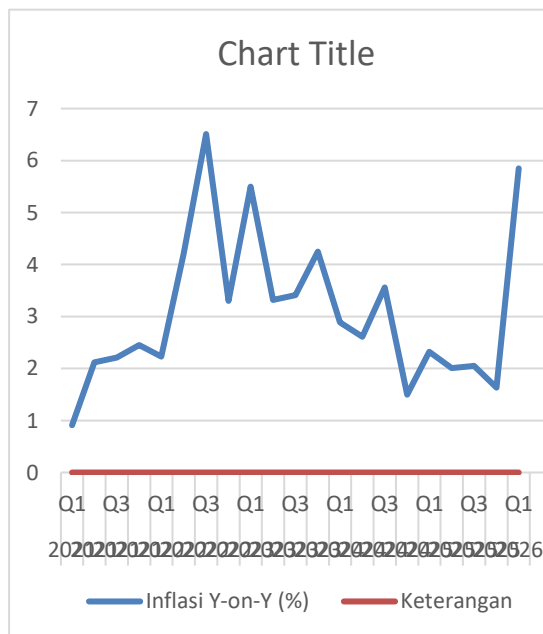
Dalam diskusi, ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Disini Anda mendapatkan kesempatan untuk menjual data Anda. Buatlah pembahasan sesuai dengan hasil, tetapi jangan mengulangi hasilnya. Seringkali harus dimulai dengan ringkasan singkat dari temuan ilmiah utama (bukan hasil eksperimen).

### Tabel Dan Grafik

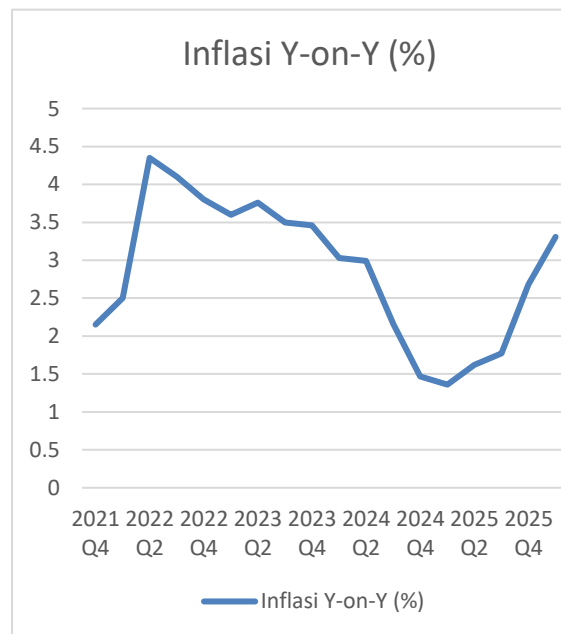
kesimpulan data dari bagian grafik dalam dokumen tersebut, yang disajikan dalam bentuk tabel komparatif beserta penjelasan paragraf untuk masing-masing indikator makroekonomi:

Periode	Provinsi Maluku Utara	Provinsi Kalimantan Timur
2021	2,45%	2,15%
2022	6,51% (Kuartal III)	4,35% (Kuartal II)
2023	-	3,46%
Akhir 2024	1,50%	1,47%
Akhir 2025	1,63%	1,36% - 1,47%
Awal 2026	5,85% (Februari)	3,31% (Maret)

MALUKU UTARA



KALIMATAN TIMUR



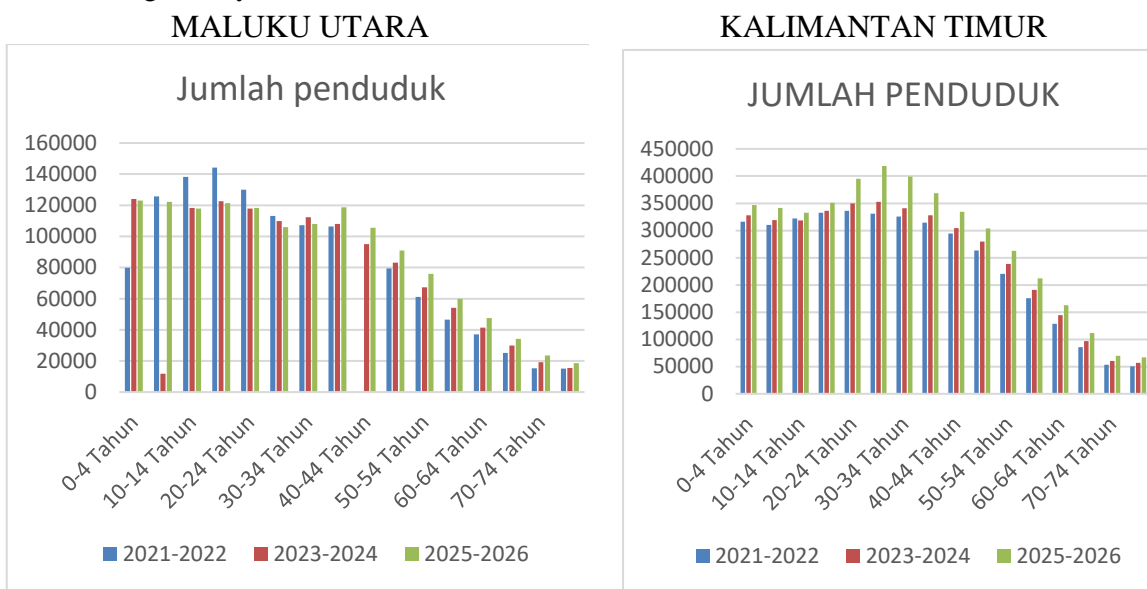
Dinamika inflasi di Provinsi Kalimantan Timur bergerak secara timbal balik dengan pengeluaran pemerintah untuk megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sempat mengalami kenaikan pada 2022 akibat penyesuaian energi global, inflasi di Kaltim berangsur stabil di kisaran 1,36% pada tahun 2025 berkat efisiensi distribusi logistik dan akselerasi infrastruktur. Pada Maret 2026, inflasi Kaltim berada di angka 3,31% yang didorong oleh kelompok pengeluaran perumahan dan jasa. Sebaliknya, grafik inflasi Maluku Utara

menunjukkan pergerakan yang sangat volatil (tidak stabil) karena sangat bergantung pada faktor cuaca dan kelancaran distribusi jalur laut. Kerentanan logistik ini membuat inflasi Maluku sering melonjak tajam, seperti pada Kuartal III 2022 (6,51%) dan Februari 2026 (5,85%) akibat gangguan pasokan pangan pokok

**Data Tingkat Pengangguran Terbuka (2021–2026)**

Periode	Provinsi Maluku Utara	Provinsi Kalimantan Timur
2021 (Awal)	5,06%	6,81%
2024 (Agustus)	4,0% – 4,3%	5,14%
2025 (November)	4,0% – 4,3%	5,20%
2026 (Februari)	4,44%	-

Berikut data grafik nya



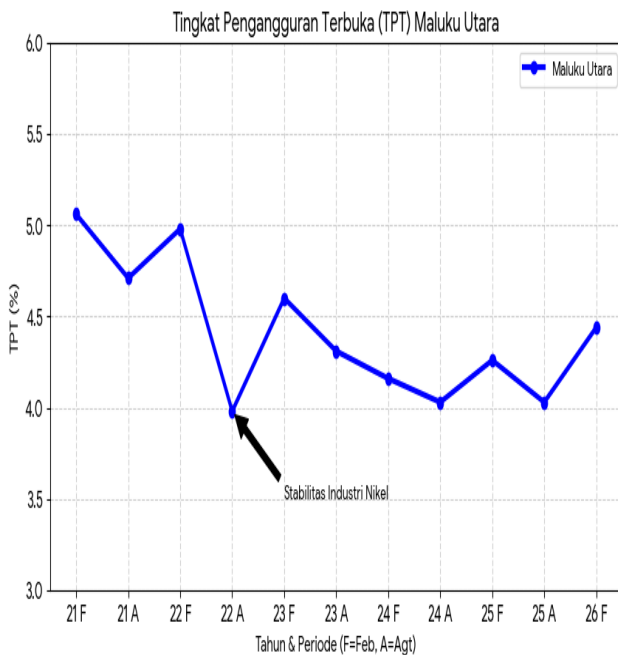
Provinsi Kalimantan Timur berhasil menekan angka pengangguran secara drastis dari 6,81% pada tahun 2021 menjadi 5,20% pada akhir 2025. Penurunan tajam ini murni didorong oleh masifnya belanja modal dan infrastruktur pemerintah di IKN yang menyerap tenaga kerja konstruksi dalam skala besar. Di sisi lain, Provinsi Maluku Utara menunjukkan ketahanan pasar kerja yang lebih stabil sejak awal, dengan tingkat pengangguran yang konsisten rendah di kisaran 4,0% hingga 4,44%. Hal ini didukung oleh penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian perdesaan dan masifnya investasi swasta di kawasan industri hilirisasi nikel. Namun, kedua provinsi memiliki anomali kesamaan, yaitu tingginya tingkat pengangguran pada lulusan pendidikan kejuruan (SMK) akibat ketidaksesuaian keterampilan (*skills mismatch*) dengan industri modern

**Data Dinamika Kependudukan / Demografi**

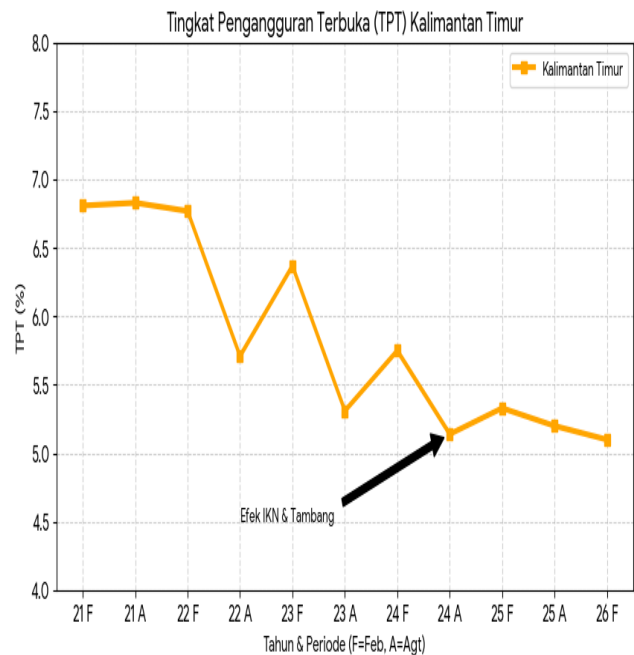
Indikator Demografi (Proyeksi)	Provinsi Maluku Utara	Provinsi Kalimantan Timur
Total Populasi (2021-2022)	~1,40 juta jiwa	~1,40 juta jiwa
Total Populasi (2025-2026)	Tumbuh stabil di ~1,40 juta jiwa	Tumbuh pesat menjadi ~1,48 juta jiwa
Kelompok Usia Produktif (15-64 thn)	Konsisten sebagai motor ekonomi	Dominan mencakup >900 ribu jiwa
Kelompok Balita (0-4 thn)	-	Melonjak 54% (79.783 menjadi 123.100 jiwa)
Kelompok Lansia (65+ thn)	-	Naik stabil (55 ribu menjadi 76 ribu jiwa)

Berikut data Grafiknya

### MALUKU UTARA



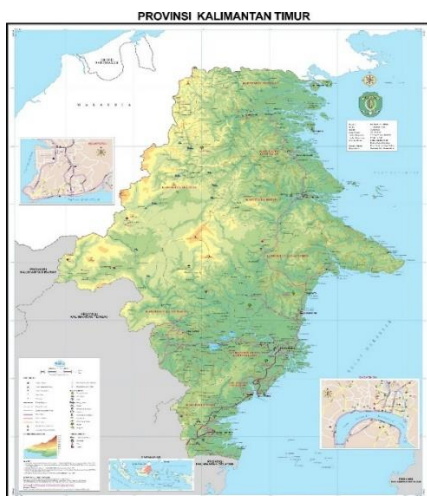
### KALIMANTAN TIMUR



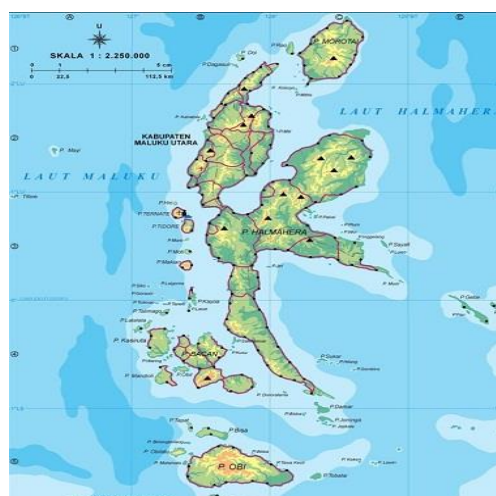
Kalimantan Timur saat ini menikmati masa bonus demografi yang sangat kuat akibat arus migrasi pekerja proyek IKN, di mana kelompok usia produktif (15-64 tahun) sangat mendominasi dengan jumlah di atas 900 ribu jiwa. Grafik di wilayah ini juga menunjukkan lonjakan signifikan pada kelompok anak-anak/remaja dan lansia, yang memaksa pemerintah setempat untuk mengalokasikan pengeluaran lebih besar pada pendidikan (Beasiswa Kaltim Tuntas), layanan kesehatan dasar, serta fasilitas pendukung lainnya. Sebaliknya, Maluku Utara menunjukkan profil pertumbuhan penduduk yang jauh lebih stabil di angka 1,40 juta jiwa dengan struktur generasi muda yang konsisten. Ledakan populasi produktif akibat investasi hilirisasi di Malut berhasil diubah menjadi mesin ekonomi tanpa menambah pengangguran struktural

Berikut gambar Provinsi Kalimantan dan Maluku Utara

### KALIMANTAN TIMUR



### MALUKU UTARA



## KESIMPULAN

Penelitian komparatif ini menyimpulkan bahwa ekspansi pengeluaran pemerintah dan ledakan migrasi demografi di Provinsi Kalimantan Timur dan Maluku Utara terbukti secara efektif mampu menekan tingkat pengangguran, namun memicu tantangan stabilitas harga yang berbeda di masing-masing wilayah. Di Kalimantan Timur, pengeluaran masif untuk megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bertindak sebagai motor utama yang menyerap tenaga kerja produktif, sehingga sukses menurunkan pengangguran dari 6,81% pada 2021 menjadi 5,20% pada 2025, dengan laju inflasi yang relatif terkendali di level 3,31% berkat efisiensi konektivitas darat. Sebaliknya, Maluku Utara berhasil mempertahankan tingkat pengangguran yang sangat rendah di kisaran 4% melalui investasi hilirisasi nikel dan ketahanan sektor pertanian, tetapi wilayah ini sangat rentan terhadap guncangan inflasi yang meroket hingga 5,85% akibat ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah melalui jalur laut.

Secara ilmiah, temuan ini memajukan bidang literatur makroekonomi regional dengan memberikan justifikasi empiris terhadap teori-teori klasik. Penelitian ini memvalidasi pandangan Keynesian bahwa stimulus pengeluaran pemerintah efektif mendongkrak permintaan agregat dan membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, temuan ini membuktikan terjadinya anomali pada asumsi Kurva Phillips klasik di daerah dengan guncangan investasi tersentralisasi. Di wilayah seperti Kaltim dan Malut, inflasi tinggi tidak terjadi karena inefisiensi produksi yang biasanya dibarengi PHK, melainkan murni dipicu oleh demand-pull inflation (tarikan permintaan) akibat ledakan populasi pekerja pendatang (migran) yang tidak diimbangi dengan kapasitas pasokan logistik lokal.

Sebagai kemungkinan aplikasi praktis dan ekstensi dari penelitian ini, pemerintah daerah dituntut untuk mereorientasi pengeluaran daerahnya (APBD) dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik statis menjadi berbasis manajemen risiko. Untuk diaplikasikan di Provinsi Maluku Utara, pengeluaran harus direkayasa untuk membangun Maritime Agro Logistics Hub terintegrasi yang dilengkapi teknologi rantai pasok dingin (Cold Storage Chain) guna menciptakan ketahanan stok pangan mandiri, sehingga lonjakan inflasi akibat hambatan cuaca laut dapat diredam. Sementara ekstensi kebijakan di Kalimantan Timur harus dialokasikan untuk membiayai Vocation Analytics Center, sebuah sistem yang memetakan kebutuhan spesifik industri dan menyelaraskannya dengan pendidikan vokasi. Langkah ini sangat krusial karena paradoks makroekonomi saat ini menunjukkan penyumbang pengangguran tertinggi di kawasan industri tersebut adalah lulusan sekolah kejuruan (SMK) akibat skills mismatch (ketidaksesuaian keterampilan). Kedua wilayah ini juga harus mulai mengalihkan belanja modal ke sektor diversifikasi non-tambang dan non-konstruksi untukantisipasi masa depan.

Untuk eksperimen di masa mendatang, disarankan agar peneliti selanjutnya menguji efektivitas realokasi anggaran ketahanan pangan dan pendidikan vokasi tersebut terhadap model pengentasan pengangguran terdidik dan inflasi daerah. Studi lanjutan juga dianjurkan untuk memperpanjang periode observasi deret waktu (time series) guna melihat efek jangka panjang pasca-konstruksi IKN, serta menguji eksperimen regresi dengan menambahkan variabel makro lainnya, seperti aliran investasi swasta murni dan tingkat kemiskinan, untuk mengukur sejauh mana bonus demografi migran ini berkontribusi pada kesejahteraan penduduk asli daerah

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Fitriawaty, M.Si., dan Irma Siagian, M.Si., selaku Dosen Pembimbing mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan ilmu, serta evaluasi yang berharga selama proses studi dan penulisan riset ini. Apresiasi dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan materiil serta akademis yang memungkinkan riset ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, ucapan terima kasih turut ditujukan kepada pihak-pihak pendukung lainnya, khususnya tim korektor yang telah membantu menyempurnakan draf naskah, serta instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, L., Manik, C. W., Ginting, H. N. B., Salsabila, S., & Hidayat, N. (n.d.). Analisis bonus demografi ditengah tingginya pengangguran terdidik di Indonesia. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*.
- Astuti, H. (2023). *Ekonomi demografi*. Penerbit Indonesia Imaji.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2026). *Berita Resmi Statistik: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Maret 2026*. bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2026). *Berita Resmi Statistik: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketenagakerjaan Februari 2026*. bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021*. BPS Provinsi Kalimantan Timur. bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2022*. BPS Provinsi Maluku Utara. bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Proyeksi Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan Maluku Utara Triwulan IV 2025*. Bank Indonesia.
- Boediono. (2001). *Ekonomi Makro, Edisi Ke Empat, BPFE-YOGYAKARTA*, Yogyakarta.
- Cahyo, M. W., & Putri, S. (2018). Dampak kebijakan moneter terhadap inflasi dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(3), 78-88.
- Darmawan, A., & Sumarsono, B. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 1-15.
- Darsana, I. M., & Sudjana, I. M. (2024). Pengaruh perubahan kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia: Perspektif makroekonomi. *Sinomika Journal*, 3(2), 145-150. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v3i2.1803>.
- <http://lanimaidiacute.blogspot.com/2012/05/hubungan-inflasi-dan-pengangguran.html>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur dan Maluku Utara Tahun Anggaran 2024-2025*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kurniawati, E., & Sugiyanto, C. (2021). Pengaruh struktur umur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 5.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Maulana, Z., & Setiawan, R. (2019). Kebijakan fiskal dan moneter dalam menanggulangi pengangguran akibat inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 15(3), 72-85.
- Nopirin Ph.D. (2000). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro, Edisi Pertama, BPFE-YOGYAKARTA*, Yogyakarta.